

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN ONLINE *E-COMMERCE*

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum

Oleh :

Hendra Lesmana

NIM. 2220112050

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Hendra Lesmana
NIM : 2220112050
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Online
E-Commerce (Studi Kasus di Kepolisian Daerah
Sumatera Barat)

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 31 Januari 2025.

Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 196212111989012001

Pembimbing II



Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL
NIP. 198208092005012002

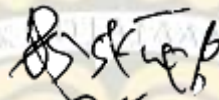
Komisi Penguji



Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001



Dr. A. Irza Rias, S.H., M.H
NIP. 196308181989011001



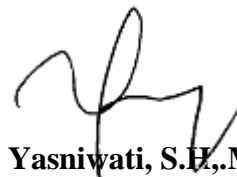
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H.
NIP. 198009112006042002

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Lesmana

Nomor Induk Mahasiswa : 2220112050

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online *E-Commerce* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”, adalah:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di program perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain didalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana yang tercantum dalam daftar kepustakaan.
2. Tidak keberatan untuk publikasi oleh Universitas Andalas dengan saran apapun baik seluruhnya maupun sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Padang, 3 Januari 2025

Hendra Lesmana

Nim: 2220112050

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE *E-COMMERCE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)

(Hendra Lesmana, 2220112050, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 105 Halaman, Tahun 2025)

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum yang dibuat untuk mengantisipasi kejahatan dalam hal ini tidak membuat tindak pidana semakin berkurang. Salah satunya yaitu tindak pidana penipuan *e-commerce* yang berkembang pesat di masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dengan 130 laporan yang diterima dalam hal tindak pidana penipuan berbasis *online*. Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum dugaan tindak pidana *e-commerce*? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan sistem *e-commerce* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat? 3. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana *e-commerce*? Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana dugaan penipuan *e-commerce* diwujudkan dengan menerima laporan dan aduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dugaan penipuan *e-commerce*. Hal tersebut diwujudkan dengan tindakan represif dan preventif yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, membantu proses hukum terhadap aduan masyarakat tak jarang dalam bentuk preventif seperti memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat himbauan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan *social media* untuk menghindari penipuan berbasis *online* 2). Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan hasil penelitian, dari 130 kasus yang diterima hanya dapat mengungkap 3 kasus yang sampai pada tahap penuntutan, yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. 127 kasus lainnya, terhenti pada tahap penyelidikan karena terkendala pada alat bukti. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Sumatera Barat seperti sarana dan prasarana, teknologi, rahasia perbankan dalam hal ini menjadi permasalahan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *e-commerce*. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk tetap membantu masyarakat dalam kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* ini dengan melakukan mediasi terlebih dahulu terhadap korban dan pelaku sebelum menindaklanjuti perkara ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Kata Kunci : *e-commerce*, kepolisian, penegakan hukum, tindak pidana penipuan

**LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE E-COMMERCE FRAUD CRIMINAL (STUDY
WEST SUMATERA REGIONAL POLICE)**

(Hendra Lesmana, 2220112050, 105 Pages, Magister Faculty Of Law, 2024)

ABSTRACT

The crime of fraud is increasingly developing following the development of the times and technological advances. The legal regulations made to anticipate crimes in this case do not reduce criminal acts. One of them is the crime of e-commerce fraud which is growing rapidly in society. This can be proven by the West Sumatra Regional Police, with 130 reports received in terms of online-based fraud. The problems that will be studied in this paper are: 1. What is the role of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on alleged e-commerce crimes? 2. How is the law enforcement of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on alleged e-commerce crimes? 3. What are the obstacles and efforts made by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on alleged e-commerce crimes? In this writing, the author uses an empirical legal method. From the results of the study, it is concluded that 1). The role of the West Sumatra Regional Police in prosecuting alleged e-commerce fraud is realized by receiving reports and complaints from the public, conducting investigations and inquiries to provide legal protection for victims of alleged e-commerce fraud. This is realized through repressive and preventive actions carried out by the West Sumatra Regional Police, assisting the legal process for public complaints, often in the form of preventive measures such as providing legal counseling to the public, an appeal to be more careful in using social media to avoid online fraud. 2). Law enforcement against alleged e-commerce fraud in the West Sumatra Regional Police based on the results of the study, out of 130 cases received, only 3 cases were able to be revealed that reached the prosecution stage, which was carried out by the West Sumatra Regional Police. The other 127 cases were stopped at the investigation stage due to constraints on evidence. 3) Factors that influence law enforcement faced by the West Sumatra Police such as facilities and infrastructure, technology, banking secrets in this case are problems in revealing cases of e-commerce fraud. Efforts made by the police to continue to help the public in cases of e-commerce fraud are by first conducting mediation between the victim and the perpetrator before following up the case to the investigation and prosecution stage.

Keywords: e-commerce, police, law enforcement, criminal act of fraud